



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ABDUL HAFIDZ BAYUAJI**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN**
3. NHK : **712065**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.760.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m<sup>2</sup>/140 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
2. Tanah Seluas 2124 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 752 m<sup>2</sup>/40 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 692 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 1838 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA CILACAP, HIBAH TANPA AKTA Rp. 75.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 118.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA LEXI Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 56.000.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 61.476.494**F. HARTA LAINNYA** Rp. 272.500.000

**Sub Total** Rp. 2.268.476.494



III. HUTANG

Rp. 168.738.460

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.099.738.034

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.